

# Kepentingan Nasional Ethiopia Dalam Pembangunan Kembali Angkatan Laut Ethiopia Pada Tahun 2018-2019

Dika Hasfirandy<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, AA Ayu Intan Parameswari<sup>3)</sup>

<sup>123)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [dikahasfirandy@gmail.com](mailto:dikahasfirandy@gmail.com)<sup>1</sup>, [sukmasushanti@unud.ac.id](mailto:sukmasushanti@unud.ac.id)<sup>2</sup>, [prameswari.intan@gmail.com](mailto:prameswari.intan@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*Ethiopia is a landlocked country. Due to these geographical conditions, Ethiopia cannot get easy access to the sea, but policy makers in Ethiopia decided to build a Navy for their country. This decision taken in 2018 is a unique case to study according to the author. This study then attempts to analyze the reasons for the development of the Ethiopian Navy. The framework of thinking used as the basis for this research is the concept of national interest, more specifically basic interests proposed by Hans. J. Morgenthau and Donald E. Nuechterlein. This study was analyzed using a qualitative methodology using secondary data sources. This research then finds the answer that the reason for Ethiopia to build a Navy is because there are several basic interests behind the decision, that is security interest, security interest and world order interest.*

**Keywords:** Ethiopia, Navy, National Interest, Basic Interest

## 1. PENDAHULUAN

Pada bulan April 2018, Perdana Menteri Abiy Ahmed mengambil kendali kepemimpinan negara Ethiopia dan berpidato di depan Angkatan Bersenjata Ethiopia untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan rencananya bahwa Ethiopia akan memiliki Angkatan Laut kembali. Dengan populasi lebih dari 102 juta orang (ThoughtCo, 2018), Ethiopia adalah negara landlocked, atau negara yang dikelilingi atau hampir dikelilingi oleh daratan, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Ethiopia kehilangan akses ke lautnya ketika negara Eritrea memisahkan diri dari Ethiopia di tahun 1993, yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi Ethiopia dan membatasi ambisi negara tersebut untuk menjadi kekuatan regional (The Economist, 2007). Ethiopia tidak memiliki akses langsung ke laut, dan menyebabkannya tidak memiliki pelabuhan, menghambat upaya negara tersebut untuk

mencapai status pendapatan menengah atau middle income melalui industrialisasi yang berorientasi ekspor. Selain itu, hubungan yang tegang antara Ethiopia dengan Eritrea telah memaksa Ethiopia untuk bergantung pada negara tetangganya yakni Djibouti untuk sebagian besar kegiatan perdagangannya. Faktanya, 95% impor dan ekspor Ethiopia melewati negara yang berpenduduk kurang dari satu juta jiwa ini (Reuters, 2018).

Ethiopia sendiri merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Afrika Timur, dengan pemerintahan yang demokratis dan cenderung stabil selama dua dekade terakhir. Terlebih, semenjak terpilihnya Abiy Ahmed sebagai perdana Menteri Ethiopia sejak April 2018, ia telah memprakarsai sejumlah pembaruan-pembaruan dalam sistem ekonomi dan hukum di negaranya, yang membawa perubahan besar terhadap tingkat perekonomian Ethiopia. Ini membuat Ethiopia semakin dilirik oleh calon investor dan

negara-negara lain untuk melakukan kerjasama ekonomi dengannya di dalam kawasan Afrika Timur. Namun, kawasan Afrika Timur yang merupakan kawasan dari Ethiopia adalah kawasan yang tidak asing dengan konflik. terlebih lagi adanya ancaman perompakan di lepas Laut Merah pada pesisir negara tetangganya, Somalia, membuat kegiatan ekonomi seperti perdagangan seringkali terhambat pada kawasan tersebut. Akses yang lebih lancar ke pasar dunia merupakan hal yang krusial bagi Ethiopia. Peralnya dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Ethiopia meningkat pesat lantaran Ethiopia telah mengembangkan perekonomiannya selain pada sektor selain agrikultur, seperti contohnya pada sektor industri dan sektor jasa atau services. Kedua sektor tersebut kini telah menjadi porsi yang signifikan dalam kegiatan perekonomian Ethiopia. Terlebih lagi selama satu dekade terakhir, pertumbuhan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) nasional Ethiopia tumbuh pada tingkat antara 8% hingga 11% per tahun, salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di antara 188 negara anggota IMF.

Kondisi ekonomi Ethiopia masa kini mengakibatkan ketergantungan terhadap akses pasar global yang harus ditingkatkan jika Ethiopia akan berupaya untuk mempertahankan maupun meningkatkan situasi ekonominya. Maka demikian upaya mengamankan akses Ethiopia kepada pelabuhan yang dapat mencapai tujuan tersebut terlihat seperti arah dan tujuan yang sudah jelas bagi Ethiopia. Dalam kasus ini mendirikan kembali Angkatan Lautnya adalah arah yang diambil oleh pemerintahan Ethiopia.

Upaya membangun angkatan laut dari awal memerlukan usaha serta komitmen jangka panjang, Ethiopia tentu saja membutuhkan mitra internasional. Calon mitra yang paling rasional untuk Ethiopia adalah Republik Djibouti. Negara kecil tapi penting secara strategis ini sudah menjadi tuan rumah pangkalan militer dari berbagai negara, termasuk Prancis, Amerika Serikat, Tiongkok, dan banyak lainnya. Letak Djibouti yang strategis serta keterbukaan negara tersebut untuk menerima pangkalan militer dari negara lain membuatnya menjadi pilihan pertama Ethiopia jika ingin membuat basis operasi untuk keperluan berlabuh bagi angkatan laut Ethiopia. Selain itu, Prancis juga merupakan mitra yang menarik karena telah menandatangani kesepakatan untuk membantu membangun kembali Angkatan Laut Ethiopia. Pada bulan Maret 2019, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menandatangani perjanjian kerjasama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, termasuk dukungan dalam membangun komponen angkatan laut. Selain itu Prancis juga berjanji akan menginvestasikan 100 miliar Euro untuk mengembangkan pertahanan Ethiopia (ModernDiplomacy, 2020).

Ethiopia sendiri bukanlah satu-satunya negara yang memiliki angkatan laut walaupun bernasib sebagai negara yang terkurung daratan atau landlocked. Beberapa negara lain juga memiliki angkatan laut yang utamanya berfungsi untuk berpatroli di badan air yang besar seperti sungai dan danau. Dengan demikian, problematika Ethiopia yang bersikeras membangun sebuah Angkatan Laut nasional walaupun terhalang oleh beberapa isu krusial yang telah disebutkan diatas adalah

motivasi penulis untuk meneliti mengenai kepentingan nasional Ethiopia dalam pembangunan kembali Angkatan Lautnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis kemudian dapat mempertanyakan mengenai apa sebenarnya kepentingan nasional Ethiopia di dalam kebijakan pemerintahnya pada pembangunan kembali Angkatan Lautnya.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini berfokus pada kebijakan Ethiopia dalam upayanya membangun kembali angkatan lautnya, dan kepentingan nasional apa yang ada di baliknya. Dengan demikian, peneliti menggunakan sejumlah buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Literatur pertama adalah sebuah buku yang bertajuk "Red Star Over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy, Second Edition", yang ditulis oleh Toshi Yoshihara dan James R. Holmes. Buku ini menggabungkan pengetahuan yang dalam tentang kondisi geopolitik Asia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber primer berbahasa Mandarin, dan dengan pengalaman tempur angkatan laut serta keahlian dalam teori kekuatan laut, para penulis buku ini menilai bagaimana kebangkitan kekuatan laut Tiongkok akan mempengaruhi strategi maritim AS di Asia. Mereka berargumen bahwa Tiongkok sedang meletakkan pondasi bagi tantangan berkelanjutan terhadap keunggulan Amerika di wilayah maritime Asia, dan untuk mempertahankan hipotesis ini, para penulis melihat kembali teori kekuatan laut Alfred Thayer Mahan, yang sekarang populer di kalangan militer Tiongkok. Melalui literatur ini,

peneliti dapat melihat alasan determinasi sebuah negara untuk mengamankan akses ke laut guna mengamankan kepentingan strategis ekonomi serta militernya.

Literatur kedua adalah sebuah jurnal dari Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi yang bertajuk "Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan" yang ditulis oleh Melita Angelin Bidara. Dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki hubungan dengan negara lain, dan masing-masing selalu memiliki kepentingan yang dikejarinya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik, seperti yang terjadi pada konflik di Laut Cina Selatan. Jurnal ini mengkaji kepentingan Amerika Serikat dalam konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik di Laut Cina Selatan serta peran dan keterlibatan Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari konflik di Laut Cina Selatan. Dalam penulisan jurnal, penulis jurnal menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, publikasi cetak, hasil penelitian dan internet (website) yang dianggap relevan. Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Konflik Internasional. Literatur ini dijadikan sebagai rujukan oleh penulis dalam dapat melihat apa kepentingan nasional negara dalam suatu kawasan perairan dan bagaimana proses pengambilan keputusan oleh setiap aktor negara tersebut. Selain itu, konsep kepentingan nasional yang dijelaskan oleh Donald E. Nuechterlein juga bisa dipelajari oleh penulis dari literatur ini.

## Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional (National Interest). Konsep ini merupakan konsep yang sering digunakan dalam menjelaskan perilaku negara dalam dunia politik internasional. Tiap negara memiliki definisi masing-masing terhadap kepentingan nasionalnya, ini dikarenakan oleh faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhinya dan definisi yang diberikan oleh rezim pemerintahan yang sedang berkuasa.

Menurut Hans. J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah faktor utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional sebuah negara. Perilaku negara dalam hubungan internasional selalu lekat dengan kepentingan nasionalnya, untuk memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara. Dari tujuan-tujuan ini para pemimpin suatu negara menurunkan kebijakan yang spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerja sama maupun konflik (Mas'ood, 1990: 163-164). Tanpa adanya kebijakan kepentingan nasional tidak dapat dicapai. Kebijakan tersebut dapat berupa cara seperti diplomasi atau intervensi. Sementara itu, menurut Donald E. Nuechterlein (1976:248), dari beberapa konsep kepentingan nasional diatas ada 4 jenis Basic Interest atau kepentingan dasar negara yang mempengaruhi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu:

*i. Defense Interests / Kepentingan Keamanan*  
“*The protection of the nation-state and its citizens against the threat of physical violence directed from another state, and/or an*

*externally inspired threat to its system of government.*”

Kepentingan keamanan dapat diartikan sebagai perlindungan negara-bangsa serta warga negaranya dari ancaman secara fisik yang berasal dari negara lain, dan/atau ancaman eksternal lain terhadap rezim pemerintahan negara itu.

*ii. Economic Interests / Kepentingan Ekonomi*  
“*The enhancement of the nation-state's economic wellbeing in relations with other states.*”

Yang berarti kepentingan ekonomi bukan lain tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi sebuah negara terjalannya menjalin hubungan dengan negara lain.

*iii. World Order Interests / Kepentingan Tatanan Dunia*

“*The maintenance of an international political and economic system in which the nation-state may feel secure, and in which its citizens and commerce may operate peacefully outside its borders.*”

Kepentingan tatanan dunia merupakan kepentingan dari sebuah negara terhadap penegakan sistem politik dan ekonomi internasional yang dapat memberikan rasa aman bagi negara, dan dapat menjaga agar aktivitas warga negara serta ekonomi dapat terjaga dengan damai diluar perbatasan negaranya.

*iv. Ideological Interests / Kepentingan Ideologi*  
“*The protection and furtherance of a set of values which the people of a nation-state share and believed to be universally good.*”

Kepentingan ini merupakan kepentingan terhadap perlindungan dan upaya penyebaran nilai-nilai yang dianut oleh warga negara

sebuah negara dan diyakini sebagai nilai-nilai tatanan hidup yang benar secara universal.

Penelitian ini menggunakan tiga (3) jenis konsep Basic Interest atau kepentingan dasar dari negara yang mempengaruhi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu *Defense*, *Economic*, dan *World Order Interest*, karena ketiga poin ini dinilai relevan oleh penulis terhadap penelitian ini.

Selain konsep-konsep national interest yang telah disebutkan di atas, ada 8 faktor nilai analisis yang mendukung konsep-konsep tersebut. Di bawah ini adalah delapan faktor nilai yang mempengaruhi kebijakan pemimpin pemerintahan yang dapat mereka pertimbangkan dari peristiwa dan masalah yang mereka hadapi, yakni *Proximity of the Danger* (Jarak Ancaman), *Nature of the Threat* (Sifat Ancaman), *Economic Stake* (Kepentingan Ekonomi), *Sentimental Attachment* (Keterikatan Sentimental), *Type of Government* (Jenis Pemerintahan), *Effect on Balance of Power* (Efek Keseimbangan Kekuasaan), *National Prestige* (Prestise Nasional), serta *Attitude of Allies and Friends* (Sikap dari Sekutu dan Teman)

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk lisan maupun tulisan, serta bersumber dari perilaku subjek yang diamati (Rahmat, 2009). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat suatu fenomena sosial yang didapat dari data-data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa permasalahan mengenai kerjasama antara

Ethiopia dan Perancis dalam membentuk kembali Angkatan Laut Ethiopia, serta melihat apa alasan negara Ethiopia setuju untuk bekerja sama dengan Perancis dalam pembentukan Angkatan Lautnya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Menurut Sugiyono (2009), data sekunder berasal dari sekumpulan data yang sudah tersedia dan diolah. Data ini dapat digunakan oleh pengumpul data lain untuk memperbarui penelitian yang sudah ada, serta membuat penelitian baru. Semua sumber data digunakan untuk mencapai tujuan penelitian berupa hasil analisis yang menjawab rumusan masalah penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen jurnal, buku, dan publikasi lainnya yang kebanyakan diambil secara online.

Dalam penelitian Hubungan Internasional, dibutuhkan unit yang menentukan arah dalam proses penelitian yang dibutuhkan untuk aspek analisis. Menurut Mas'ood (1990) negara merupakan salah jenis unit analisis yang dapat digunakan dalam penelitian Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan negara Ethiopia sebagai unit analisisnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan penyajian data dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, artikel, dengan sumber media online maupun cetak, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Sejarah Angkatan Laut Ethiopia

Pada tahun 1955 Angkatan Laut Kekaisaran Ethiopia dibentuk dan pangkalan utama dan paling besar, Pangkalan Angkatan Laut Haile Selassie I, didirikan pada tahun 1956 di Massawa, Eritrea. Pada tahun 1957 Angkatan Laut Ethiopia menerima kapal pertamanya. Pada awal 1960-an pelabuhan dan fasilitas pangkalan angkatan laut lainnya dibangun di Massawa untuk mewujudkan kapabilitas penuh dari pangkalan angkatan laut tersebut (Gray, 1983). Pada tahun 1958 Angkatan Laut Ethiopia menjadi cabang dari angkatan bersenjata nasional yang sepenuhnya independen, diorganisir sebagai salah satu dari tiga cabang angkatan bersenjata Ethiopia, bersama dengan Angkatan Darat Ethiopia dan Angkatan Udara Ethiopia di bawah komando keseluruhan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Ethiopia. Angkatan Laut ini dibentuk dengan tujuan tugas menjaga keamanan dan berpatroli di Laut Merah. Angkatan Laut Ethiopia pada saat itu beroperasi dari perairan teritorial di lepas pantai Eritrea.

Angkatan Laut Ethiopia kehilangan pelabuhan utama dan komunikasi dengan pedalaman Ethiopia ketika perang kemerdekaan Eritrea pecah, dan pasukan pemberontak Eritrea merebut Massawa pada Maret 1990, memaksa jajaran Markas Besar Angkatan Laut untuk pindah ke pedalaman ke Addis Ababa. Keberhasilan pasukan Eritrea semakin mengisolasi pangkalan angkatan laut Ethiopia sepanjang tahun 1990-an. Perang Saudara Ethiopia dan Perang Kemerdekaan Eritrea berakhir tak lama setelah jatuhnya Assab pada tahun 1991 dan Eritrea merdeka, meninggalkan Ethiopia sebagai negara *landlocked* (terkurung daratan)

#### **4.2 Kondisi Ethiopia Pasca Kemerdekaan Eritrea**

Pemerintahan baru Ethiopia pasca lepasnya Eritrea, dipimpin oleh politisi dari suku Tigray, ketua EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front). Ethiopia melalui pengakuan atas heterogenitas etnis negara itu. Ethiopia tidak akan lagi menjadi negara otoriter; sebaliknya, negara itu akan dibentuk menjadi federasi sukarela yang terdiri dari banyak suku-bangsa. Untuk tujuan ini, EPRDF dan kelompok politik lainnya, menyetujui pembentukan pemerintahan transisi yang akan merancang konstitusi dan pemilihan baru, untuk piagam nasional yang mengakui pembagian kekuasaan politik etnis, dan hak kebangsaan.

Pada tahun 1994 EPRDF mengadopsi konstitusi baru untuk Ethiopia dan diumumkan pada tahun 1995 kepada publik, melahirkan Republik Demokratik Federal Ethiopia. Konstitusi ini menekankan prinsip-prinsip regionalisme dan otonomi etnis, menyerahkan kekuasaan kepada wilayah regional negara. Sepanjang tahun 90-an, pemerintah Ethiopia bekerja dengan negara donor dan Bank Dunia untuk membentuk program penyesuaian struktural. Program ini mendevaluasi mata uang Ethiopia, dan secara tajam mengurangi intervensi pemerintah dalam perekonomian, merampingkan badan-badan nasional yang kurang efektif, dan mempermudah perusahaan asing untuk berinvestasi di Ethiopia.

Ekonomi tumbuh perlahan-lahan, sejak tahun 1991, pemerintah Ethiopia telah memulai program reformasi ekonomi, termasuk privatisasi perusahaan negara dan rasionalisasi peraturan pemerintah. Sementara prosesnya masih berlangsung,

reformasi tersebut telah menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan.

### **4.3 Pembentukan Kembali Angkatan Laut Ethiopia**

Dalam kebijakannya untuk membuat kembali sebuah angkatan laut, Ethiopia dipengaruhi oleh berbagai situasi mulai dari kondisi politik dalam dan luar negeri, situasi sosio-ekonomi negara, kawasan, serta global, serta ancaman keamanan dari dalam dan luar negeri, yang dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Perdana Menteri Abiy Ahmed telah memimpin upaya ambisius untuk mengintegrasikan negara, baik secara politik maupun ekonomi, dengan negara tetangganya di sekitar kawasan, termasuk Eritrea, Djibouti, Somalia, dan lainnya. Langkah itu juga dilakukan setelah beberapa dekade perang yang tidak stabil dan masalah lain yang melanda kawasan itu. Perdana Menteri Abiy Ahmed telah mendapat dukungan dari rekan-rekan regionalnya berkat upayanya untuk mendorong stabilitas yang lebih besar melalui integrasi; sekarang, dengan mendorong angkatan laut, Addis Ababa menambahkan komponen maritim ke keseluruhan upaya ini.

Akses yang lebih lancar ke pasar global sangat penting bagi Ethiopia. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, situasi ekonomi Ethiopia telah meningkat pesat karena Ethiopia telah mengembangkan ekonominya di samping sektor lain selain pertanian, seperti sektor industri dan jasa. Kedua sektor ini sekarang telah menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi Ethiopia. Selain itu, selama dekade terakhir, total pertumbuhan PDB nasional (produk domestik bruto) Ethiopia telah tumbuh pada tingkat 8% hingga 11% per tahun, salah satu negara

dengan pertumbuhan tercepat di antara 188 negara anggota IMF. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi publik di bidang infrastruktur serta kemajuan yang berkelanjutan di sektor pertanian dan jasa. Sekitar 70% penduduk Ethiopia masih bekerja di pertanian, tetapi sektor jasa telah melampaui pertanian sebagai penyumbang utama PDB Ethiopia (CIA.gov, 2021).

Pada akhirnya untuk Ethiopia, membangun angkatan laut dari awal akan menjadi proses yang panjang dan mahal, terutama jika negara tersebut ingin mengembangkan armada dengan kemampuan tinggi.

### **4.4 Hasil Temuan dan Analisis**

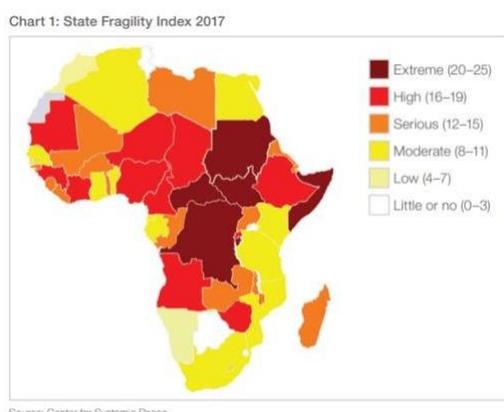
Penulis akan mencoba menggambarkan hasil dari penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, di bagian pertama penulis akan menganalisis bagaimana *basic interest* atau kepentingan dasar mempengaruhi kebijakan Ethiopia dalam mencapai kepentingan nasionalnya untuk membangun kembali Angkatan Lautnya. Pada bagian kedua penulis akan menjabarkan hasil implementasi kebijakan Ethiopia untuk mencapai kepentingannya.

#### **4.4.1. Kepentingan Keamanan**

Ethiopia terletak di kawasan *Horn of Africa* atau Tanduk Afrika, yang mana wilayah ini adalah yang paling bergejolak di Afrika. Negara yang paling rentan terhadap insiden kekerasan yakni Somalia, berada di Tanduk Afrika, dan adalah negara tetangga Ethiopia. Negara bagian tetangga di wilayah *Horn of Africa* dan *Great Lakes* mengalami insiden kekerasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dapat dilihat dari peta di atas bahwa, dengan pengecualian Republik

Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo, semua negara lain yang diklasifikasikan sebagai sangat rentan terhadap konflik dan kekerasan berada di kawasan *Horn of Africa* dan *Great Lakes*.

Gambar I. Peta *state fragility index* / kerentanan negara.



Sumber: Institute for Security Studies. (2021)

Wilayah ini adalah yang paling bergejolak di benua Afrika. Negara yang paling rentan terhadap kekerasan dan konflik, Somalia, berada di kawasan *Horn of Africa*. Negara tetangga di wilayah *Horn* dan *Great Lakes* mengalami insiden kekerasan dan konflik yang cukup tinggi dibandingkan dengan kawasan lain di Afrika. Dapat dilihat dari penjelasan dan grafik di atas, kawasan regional tempat negara Ethiopia sendiri berada adalah salah satu kawasan yang rentan terhadap konflik dan kekerasan. Atas dasar ini, Ethiopia jelas memiliki kepentingan keamanan yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi keamanan nasional Ethiopia.

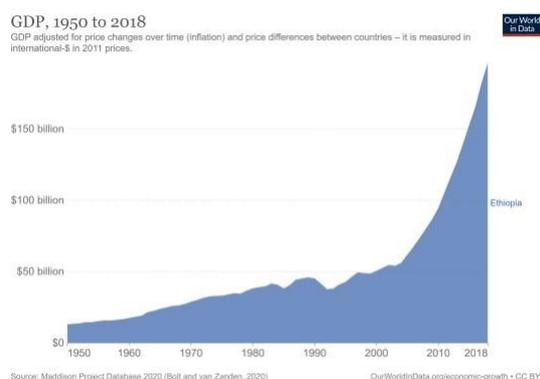
Kondisi keamanan regional yang telah dijelaskan di atas, menampilkan resiko keamanan bagi Ethiopia. Situasi ini membuat Ethiopia harus mempertimbangkan lagi mengenai pembentukan Angkatan Lautnya untuk mengimplementasikan dan mengejar

tujuan dari kepentingannya di kawasan tersebut. Salah satu ancaman yang berdampak pada kebijakan membentuk Angkatan Laut adalah ketidakstabilan negara Somalia, yang mengakibatkan banyaknya organisasi kriminal, ekstrimis dan teroris terorganisir di negara tersebut.

Kasus ini juga dapat dilihat dengan beberapa aspek faktor pendukung *basic interest*, yakni diantaranya adalah dari segi *Proximity of the Danger* atau Jarak Ancaman, *Nature of the Threat* atau Sifat Ancaman, *Type of Government* atau Jenis Pemerintahan.

#### 4.4.2 Kepentingan Ekonomi

Gambar II. Perkembangan PDB Ethiopia tahun 1950-2018.



Sumber: OurWorldInData. (2018)

Ethiopia, sama seperti negara-negara lainnya di dunia, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada beberapa dekade terakhir. Hal ini tidak lain adalah berkat dari pengaruh globalisasi, yang mana berdampak kepada semakin meningkatnya jenis dan volume kegiatan ekonomi serta perdagangan internasional, tak terkecuali di Ethiopia. Dalam kasus Ethiopia sendiri, negara ini mengalami pertumbuhan paling pesat pada 30 tahun terakhir, dimana pada tahun 1990-an negara ini hanya memiliki jumlah PDB per tahun yang tidak pernah lebih dari 50 *billion* (milyar) dollar

AS. Seperti yang bisa dilihat pada grafik di atas, jumlah PDB Ethiopia meningkat lebih dari 3 kali lipat hingga melebihi 150 *billion* (milyar) dollar AS di tahun 2018.

Laju pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertahankan oleh pemegang kebijakan negara, tak terkecuali Ethiopia. Selain berimbas pada kesejahteraan rakyat, ekonomi yang kuat juga dapat meningkatkan kapabilitas negara dalam bidang krusial lainnya, seperti dalam bidang pertahanan. Pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat Ethiopia sanggup untuk mempertimbangkan rencana pembentukan kembali Angkatan Laut Ethiopia. Maka oleh sebab itu, kepentingan ekonomi yang dalam kasus ini adalah pertumbuhan ekonomi nasional adalah salah satu kepentingan nasional Ethiopia yang harus dijaga laju pertumbuhannya.

Perkembangan ini selaras dengan konsep *basic interest* atau kepentingan nasional dasar yang dibawakan oleh Nuechterlein (1976:248), yakni *Economic interest* atau kepentingan ekonomi. "*The enhancement of the nation-state's economic wellbeing in relations with other states.*" Kepentingan ekonomi bukan lain tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi sebuah negara terjalannya menjalin hubungan dengan negara lain. Perdagangan, investasi, serta kegiatan ekonomi lain dari Ethiopia yang bersangkutan dengan negara lain sangat mempengaruhi proses penentuan kebijakan dan *interest* Ethiopia itu sendiri. Hal ini membuat situasi ekonomi Ethiopia dapat menjadi penentu dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya, yakni membangun

sebuah Angkatan Laut yang dapat menjaga, dan pada akhirnya meningkatkan jumlah, intensitas dan volume aliran impor - ekspor barang serta jasa dari dan ke dalam Ethiopia.

Kondisi ini tidak lepas dengan faktor nilai yang mempengaruhi keputusan Ethiopia dalam pembentukan Angkatan Lautnya, yakni diantaranya adalah *Economic Stake* atau Kepentingan Ekonomi. Dalam hal ini, kepentingan ekonomi Ethiopia bisa dilihat jelas dari segi perkembangan nilai serta volume kegiatan ekonomi Ethiopia dalam setiap tahunnya.

#### **4.4.3. Kepentingan Tatanan Dunia**

Populasi gabungan dari negara Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Somalia dan Sudan mencapai hampir 200 juta orang yang merupakan sekitar 15% dari total populasi di benua Afrika. Secara geografis, negara-negara timur Afrika ini terletak di kawasan yang strategis tetapi beberapa dari negara-negara tersebut masih tertinggal secara ekonomi. Infrastruktur jalan dan jaringan rel kereta api kurang berkembang, yang akibatnya membuat biaya logistik dan transportasi menjadi mahal dan tidak menarik bagi investor. Selain itu, konflik bersenjata dan perang saudara yang terus-menerus berkecamuk di kawasan ini telah mengakibatkan ketidakstabilan yang berisiko bagi perdagangan dan investor asing.

Sementara itu, Ethiopia adalah pemimpin pasar untuk minyak dan lemak karena pasar konsumen yang cukup besar. 115 juta orang populasinya mengonsumsi 500.000 Metrik Ton dan volumenya rendah karena konsumsi per kapita mereka hanya 5kg. Sudan, pasar dengan 50 juta orang juga merupakan pasar penting dan saat ini menyerap hampir setengah juta Metrik Ton

minyak dan lemak. Selain kedua negara itu, potensi pasar di kawasan ini belum sepenuhnya dimaksimalkan dan dapat dikembangkan lebih lanjut (Zaharah, 2020).

Gambar III. Tabel jumlah ekspor minyak sawit Malaysia ke negara-negara Afrika Timur.

Malaysian Palm Oil Export to Selected North Africa Markets

COUNTRY	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Somalia	55,765	61,306	80,381	82,322	77,829	93,456
Ethiopia	51,435	94,090	136,232	173,991	148,647	64,707
Djibouti	29,266	54,764	80,213	137,995	216,190	52,316
Sudan	3,801	5,377	3,422	14,647	4,359	7,457
Eritrea	1,820	4,816	7,512	9,563	5,940	4,936
Grand Total	542,359	498,724	527,464	686,379	571,911	346,182

Source: MPOB

Sumber: Malaysian Palm Oil Council (MPOC). (2020)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa Ethiopia dan beberapa negara tetangganya merupakan salah satu tujuan ekspor minyak sawit Malaysia. Saat ini, pelabuhan sekitarnya Ethiopia memanfaatkan pasar Ethiopia yang merupakan pasar terbesar di kawasan ini, dan juga Sudan dan Somaliland serta Somalia. Ada enam pelabuhan utama di kawasan ini yaitu Pelabuhan Sudan di Sudan, Pelabuhan Masawwa dan Assab di Eritrea, Pelabuhan Berbera di Somaliland dan Pelabuhan Mogadishu di Somalia. Pusat perdagangan maritim ini adalah Ethiopia dan sebenarnya, Ethiopia memiliki beberapa saham di Pelabuhan Djibouti, Berbera, dan Pelabuhan Sudan. Kawasan ini dianggap penting karena lokasinya yang strategis yang menarik investasi besar dari investor negara-negara Timur-Tengah.

Potensi minyak sawit yang masuk ke wilayah tersebut sangat bergantung pada kemajuan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan di negara yang bersangkutan dapat membantu negara-negara tersebut untuk maju melalui meningkatnya kegiatan perdagangan

dan investasi yang masuk. Volume minyak sawit Malaysia yang masuk ke pasar tidak tumbuh secara signifikan selama lima tahun terakhir, dan volume tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi. Volume tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi. Untuk memperkuat posisi kelapa sawit Malaysia, perusahaan Malaysia harus mempertimbangkan investasi bersama di daerah yang akan memberikan keuntungan sejauh akses ke pedalaman.

Dari situasi di atas, penulis juga dapat menyimpulkan bahwa kondisi ini tidak lepas dengan faktor nilai yang mempengaruhi keputusan Ethiopia dalam pembentukan Angkatan Lautnya, yakni beberapa diantaranya adalah *Proximity of the Danger* atau Jarak Ancaman, *Economic Stake* atau Kepentingan Ekonomi, serta *National Prestige* atau Prestise Nasional.

#### 4.4.4 Fasilitas, Markas, Pelabuhan dan faktor Pendukung Pembentukan Angkatan Laut Ethiopia

Lebih dari tiga dekade setelah kehilangan aksesnya ke garis pantai, Ethiopia merencanakan jalan ke laut sekali lagi. Selama kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Addis Ababa pada Maret 2019, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan untuk mengembangkan angkatan laut Ethiopia di masa depan, yang adalah hasil dari proses diplomasi berbulan-bulan antara Ethiopia dan Prancis membahas hubungan yang lebih erat dalam urusan maritim.

Perdana Menteri Abiy Ahmed ingin menjadikan negaranya sebagai aktor penting dalam perdagangan internasional, tetapi hal itu akan mewajibkan Addis Ababa untuk

melindungi rute perdagangannya di tahun-tahun mendatang. Ethiopia telah menanamkan saham yang lebih besar di pelabuhan di Sudan, Djibouti dan Somaliland, serta membangun lebih banyak koneksi logistik ke jalur lautnya, tetapi pada akhirnya membangun angkatan laut akan membantu meyakinkan komunitas internasional, dan khususnya investor asing, bahwa kawasan *Horn of Africa* adalah lingkungan yang aman dan dijamin oleh kekuatan maritim Ethiopia.

Gambar IV. Peta letak kawasan strategis di sekitar *Horn of Africa*.



Sumber: Stratfor. (2019)

Ethiopia telah mengakuisisi 19% kepentingan dalam pengembangan pelabuhan. Mitra lain dalam proyek ini adalah DP World dengan pangsa 51%: dan Somaliland dengan pangsa 30% (AddisStandard, 2018). Pemerintah Ethiopia juga berinvestasi dalam infrastruktur untuk mengembangkan Koridor Berbera sebagai pintu gerbang perdagangan untuk negara *landlocked* ini, yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ada juga rencana untuk membangun tempat berlabuh tambahan di Pelabuhan Berbera, sejalan dengan rencana *masterplan* pelabuhan Berbera, yang telah mulai diterapkan oleh DP World, sambil

menambahkan peralatan baru untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain untuk keperluan kargo, pelabuhan ini juga dapat menjadi basis kegiatan *resupplying* untuk kapal perang.

Pemerintah Ethiopia juga telah menegosiasikan bagian kepemilikan di pelabuhan Djibouti (Reuters, 2018), serta Port Sudan. Pemerintah Ethiopia dan Sudan telah menekankan pentingnya kerja sama dalam layanan dan pemanfaatan pelabuhan karena Ethiopia yang bermaksud untuk meningkatkan aksesnya ke pelabuhan. Pejabat tingkat tinggi dari kedua negara tetangga ini telah membahas tentang masalah layanan dan pemanfaatan pelabuhan, perusahaan pelabuhan laut Sudan akan memberikan semua dukungan yang diperlukan bagi Ethiopia untuk menggunakan Pelabuhan Sudan untuk komoditas ekspor-impornya.

Ethiopia telah mengembangkan infrastruktur untuk menghubungkan negaranya ke pelabuhan seperti jalur kereta api ke Djibouti dan juga menghubungkannya dengan jalan ke Berbera. Somaliland dan Ethiopia telah meluncurkan proyek jalan senilai 400 juta dolar AS yang akan menghubungkan kota perbatasan Togochole di Ethiopia dengan Pelabuhan Berbera di Somaliland. Jalan tersebut akan memberikan akses bagi Ethiopia yang terkurung daratan ke pelabuhan tambahan dan secara signifikan meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Diperkirakan impor Somaliland ke Ethiopia bernilai lebih dari USD 800 juta per tahun (CRO, 2019).

Dapat dilihat di peta di atas bahwa Ethiopia bukan satu-satunya Negara yang berusaha membangun kehadiran strategis di

sepanjang rute pelayaran Tanduk Afrika. Sebuah rute yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut Merah dan Laut Mediterania. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab, selain menunjukkan kehadiran mereka secara ekonomi, telah mengamankan kehadiran militer dalam upaya mengamankan jalur pelayaran dari ancaman perompak dan gangguan lainnya. Terlebih, menurut laporan BBC (BBC, 2018), pemerintah Ethiopia menjadi sangat prihatin bahwa Djibouti diduduki oleh angkatan laut negara asing. Oleh karena itu, menyadari ancaman strategis dan politik yang ditimbulkan terhadap kepentingan nasional Ethiopia, pemerintah Ethiopia, selain melakukan strategi diversifikasi akses ke laut serta pelabuhan, juga telah mengadopsi strategi meningkatkan kehadiran militernya di kawasan itu dengan membentuk Angkatan Laut untuk melindungi kepentingannya di jalur pelayaran Selat Bab al Mandab dengan fokus di Laut Merah dan Samudera Hindia.

Dikabarkan pada tahun 2019 bahwa Brigadir Jenderal Kindu Gezu dari militer Ethiopia akan menjadi panglima angkatan laut pertama yang baru. Ia telah dilantik menjadi panglima AL pada 2021 lalu (Addis Standard, 2022). Dalam pembentukan kembali angkatan laut Ethiopia, yang diproyeksikan menjadi kekuatan regional yang baru di kawasan itu, Prancis memberikan dukungan termasuk pelatihan untuk personel. Adapun pengiriman 1.000 perwira tentara yang dipilih dari berbagai divisi tentara Ethiopia telah dikirim ke Rusia untuk pelatihan angkatan laut. Ethiopia telah memutuskan untuk mendirikan angkatan laut di Djibouti, sementara di masa depan mungkin memiliki lebih banyak pangkalan di wilayah

tersebut. Saat ini proses pembentukan angkatan laut sedang berlangsung di Addis Ababa. Para pemimpin kedua negara Djibouti dan Ethiopia telah berbicara tentang pendirian pangkalan di Djibouti yang menampung pasukan asing dari sekitar enam negara termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Italia dan Prancis. Ethiopia juga berusaha untuk membeli senjata senilai lebih dari 4 miliar Euro dari Prancis dengan basis kredit jangka panjang. Daftar belanja kredit termasuk 12 pesawat tempur, 18 helikopter maritim, dua pesawat angkut militer buatan Airbus, 10 drone tempur tak berawak, sistem jamming elektronik, dan 30 rudal M51 yang mampu mengenai target pada jarak 6000 kilometer (Yewondwossen, 2019).

Selain upaya ekonomi dan militer, pemerintah Ethiopia juga bekerja di tingkat diplomatik untuk menjaga hubungan politik dengan semua kekuatan asing yang memiliki kepentingan di kawasan Tanduk Afrika dan rute pelayaran Selat Bab al Mandab. Keterlibatan diplomatik ini termasuk menjalin hubungan diplomatik dengan Qatar, yang merupakan saingan Saudi dan UEA. Tentu saja, tantangan internal Ethiopia sendiri masih bisa menggagalkan impian negara itu untuk memiliki angkatan laut. Masih ada beberapa konflik internal yang signifikan terus berkobar di dalam negeri, membutuhkan tingkat tenaga kerja, sumber daya, dan perhatian yang signifikan dari pemerintah nasional. Jika Ethiopia gagal menstabilkan negaranya secara internal, negara ini mungkin tidak punya pilihan selain mengerem proyek-proyeknya yang lebih ambisius, seperti ambisi untuk membangun angkatan laut ini.

Sejak berkuasa tahun 2018 lalu, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah meraih keberhasilan pada hal yang tampaknya mustahil dengan mencapai perdamaian dengan bekas provinsi Ethiopia, Eritrea, dan mengambil langkah untuk membuka negaranya kepada dunia. Ketika ekonomi Ethiopia tumbuh dengan pesat, negara yang terkurung daratan itu telah menetapkan jalur untuk prestasi lain yang tampaknya mustahil, yaitu dengan membangun angkatan laut. Di luar kekurangan geografisnya, Ethiopia akan menghadapi lebih dari sekadar tantangan dalam memperkenalkan kekuatan maritimnya, tetapi untuk saat ini, Addis Ababa telah menyatakan keinginannya untuk kembali mengerahkan angkatan lautnya di perairan kawasan sekitarnya sekali lagi.

## 5. KESIMPULAN

Melihat dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Ethiopia pada tahun 2018 hingga 2019 menggunakan 3 cara konsep dari *basic interest* sebagai pendukung kepentingan nasionalnya untuk membentuk kembali Angkatan Lautnya. Ketiga konsep *basic interest* tersebut adalah *defence interest* atau kepentingan keamanan, *economic interest* atau kepentingan ekonomi, dan *world order interest* atau kepentingan tatanan dunia. Ketiga konsep kepentingan dasar tersebut juga didukung oleh beberapa faktor seperti *proximity of the danger*, atau Jarak Ancaman, *nature of the threat* atau Sifat Ancaman, *type of government* atau jenis pemerintahan, *economic stake* atau kepentingan ekonomi, serta *national prestige* atau prestise nasional. Selanjutnya dengan menggunakan *basic national interest*, yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein, dapat dilihat bahwa

beberapa kebijakan yang diambil oleh Ethiopia selaras dengan konsep *national interest* Nuechterlein. Kebijakan yang dimaksud adalah pembentukan kembali Angkatan Laut Ethiopia.

Penulis melihat masih adanya beberapa hal yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan di penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kasus serupa. Pertama, dikarenakan masih sedikitnya topik mengenai negara-negara di kawasan Afrika pada umumnya dan Ethiopia secara khusus, diharapkan untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan akses terhadap sumber informasi yang ada, terutama pada media online. Kedua, pembangunan kembali Angkatan Laut Ethiopia sebagai objek penelitian hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian dan belum sepenuhnya rampung, sehingga penulis harus memfokuskan penelitian pada tahap awal pembangunan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh situasi di Ethiopia yang pada saat penulisan skripsi ini, masih bersengketa dalam konflik internal dengan kelompok pemberontak Tigray. Hal ini menyebabkan tertundanya proyek pembangunan angkatan laut dari Ethiopia itu sendiri. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar memperhatikan situasi serupa sebelum memutuskan untuk meneliti tentang kasus yang sejenis.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdulhadi, Z., Zhou, Y., Wang, L. (2021). *An Adaptable Conceptual Model for Construction Technology Transfer: The BRI in Africa, the Case of Ethiopia*. Sustainability. 13. 3376. 10.3390/su13063376.

- Bhorat, H., Tarp, F. (2016). *Africa's Lions: Growth Traps and Opportunities for Six African Economies*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Bidara, M., Mamentu, M., Tulung, T. (2018). *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan*. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Gandhi, J., Vreeland, J. (2008). *Political Institutions and Civil War: Unpacking Anocracy*. Journal of Conflict Solutions. 52 (3): 401–425
- Gray, R. (1983). *Conway's All the World's Fighting Ships 1947–1982, Part II: The Warsaw Pact and Non-Aligned Nations*. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press.
- Kirchberger, S. (2015). *Assessing China's Naval Power: Technological Innovation, Economic Constraints, and Strategic Implications*. Heidelberg: Springer.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nuechterlein, Donald E. (1976). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. British Journal of International Studies. Vol 2.
- Rachmat Kriyantono. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wepundi, M., Sharamo, R. (2021). *The State of Peace and Security in East Africa*. Institute for Security Studies.
- Yoshihara, Toshi., Holmes, James R. (2018). *Red Star Over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy, Second Edition*. Annapolis: MD: Naval Institute Press.
- Media Online**
- Addis Standard. (2018). *Ethiopia Acquires 19% Stake in DP World Berbera Port*. Diakses 7 Juni 2022, <https://addisstandard.com/news-ethiopia-acquires-19-stake-dp-world-berbera-port/>
- Africa News. (2019). *Ethiopia Navy to be based in Djibouti, command HQ in Bahir Dar* (Report) - Africanews. Diakses 10 Juni 2020, <https://www.africanews.com/2019/12/03/ethiopia-navy-to-be-based-in-djibouti-command-hq-in-bahir-dar-report/>
- AllAfrica. (2020). *Ethiopia: Without a Sea Coast Why Is Ethiopia Trying to Reestablish a Navy?*. Diakses 10 Juni 2020, <https://allafrica.com/stories/202001280542.html>
- CaspianReport. (2019). *Landlocked Ethiopia wants a navy* [Video]. Diakses 2 Mei 2021, Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=EBUyK0orjdc>
- Construction Review Online. (2019). *US \$400m Road project linking Ethiopia to Somaliland's Berbera Port kicks off*. Diakses 8 Mei 2022, <https://constructionreviewonline.com/news/ethiopia/us-400m-road-project-linking-ethiopia-to-somalias-berbera-port-kicks-off/>
- Demissie, S. (2021). *Djibouti looks to Ethiopia to gauge its economic future*. Institute for Security Studies. Diakses 4 Mei 2022, <https://issafrica.org/iss-today/djibouti-looks-to-ethiopia-to-gauge-its-economic-future>
- Harper, M. (2015). *Can Ethiopia's railway bring peace to Somalia?*. BBC World Service News, Addis Ababa. Diakses 18 Februari 2022, <https://www.bbc.com/news/world-africa-34871074>
- Harper, M. (2018). *How the crisis in the Gulf could spread to East Africa*. BBC News. Diakses 4 Oktober 2020, <https://www.bbc.com/news/world-africa-43585814>
- Igrouane, Y. (2019). *Djibouti: A Busy Hub of Foreign Military Bases on the Horn of Africa*. Diakses 20 Juni 2021, <https://insidearabia.com/djibouti-a-busy-hub-of-foreign-military-bases-on-the-horn-of-africa/>
- Jenkins, C. (1999). *Ethiopians target port area*. BBC World. Diakses 10 Juni 2022, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/280267.stm>
- Maasho, A. Reuters. (2018). *Ethiopia to take stake in Port of Djibouti, its trade gateway* - state media. Diakses 30 April 2021, <https://www.reuters.com/article/ethiopia-djibouti-idUSL8N1S81QA>

- Malhotra, A., & Malhotra, A. (2020). *Ethiopian Naval Ambitions*. Diakses 3 Mei 2021, <https://moderndiplomacy.eu/2020/07/10/ethopian-naval-ambitions/>
- Olewe, D. (2018). *Why landlocked Ethiopia wants to launch a navy*. BBC News. Diakses 25 Januari 2021, <https://www.bbc.com/news/world-africa-44369382>
- Stratfor. (2019). *Landlocked Ethiopia Charts a Course for a Navy*. Diakses 4 Mei 2021, <https://worldview.stratfor.com/article/landlocked-ethiopia-charts-course-navy>
- The East African. (2020). *Ethiopia, Sudan mull cooperation on port service*. Diakses 10 Mei 2022, <https://www.theeastafrican.co.ke/business/Ethiopia-sudan-mull-cooperation-on-port-service/2560-5405074-13amv27/index.html>
- The Economist. (2007). *A brittle Western ally in the Horn of Africa*. Diakses 13 Juni 2021, <https://www.economist.com/briefing/2007/11/01/a-brittle-western-ally-in-the-horn-of-africa>
- ThoughtCo. (2018). *The 10 Biggest Landlocked Countries*. Diakses 30 April 2021, <https://www.thoughtco.com/largest-landlocked-countries-4158616>
- Toelgyes, C., & Toelgyes, C. (2020). *The revival of Ethiopian Navy, the Horn of Africa, the Red Sea, Regional power dynamics - Africa Express: notizie dal continente dimenticato*. Diakses 10 Juni 2020, <https://www.africa-express.info/2020/01/25/the-revival-of-ethiopian-navy-the-horn-of-africa-the-red-sea-regional-power-dynamics/>
- Voice Of America. (2016). *Ethiopia's New Coastal Rail Link Runs Through Restive Region*. Diakses 11 Juni 2021, <https://www.voanews.com/africa/ethiopias-new-coastal-rail-link-runs-through-restive-region>
- Yewondwossen, M. (2019). *Kindu Gezu to lead new navy*. Capital Ethiopia. Diakses 12 Juni 2022, <https://www.capitalethiopia.com/news-news/kindu-gezu-to-lead-new-navy/>
- Zaharah, F. (2020). *North Africa Ports Infrastructure – A Gateway To Land-Locked African Markets*. Malaysian Palm Oil Council (MPOC). Diakses 12 Maret 2022, <https://mpoc.org.my/north-africa-ports-infrastructure-a-gateway-to-land-locked-african-markets/>